



Laporan  
**Tahunan**

DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**2023**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan ke Allah SWT, karena berkat rahmat dan ijin-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB untuk tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat yang diterbitkan oleh PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dilaksanakan serta kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas PUPR Provinsi NTB.

Demikian laporan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram,     Maret 2023

KETUA PPID DINAS PUPR PROVINSI NTB

**Ir. H. Hasim, MT**

**DAFTAR ISI**

COVER .....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAGIAN I GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI .....	5
1.1 Regulasi .....	6
1.2 Arah Prioritas Pelayanan.....	6
BAGIAN II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI .....	7
2.1 Sekretariat Layanan.....	7
2.2 Sumber Daya Manusia .....	8
2.3 Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Provinsi NTB.....	8
2.4 Besaran Anggaran .....	9
BAGIAN III LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK .....	10
BAGIAN IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI.....	12
BAGIAN V KENDALA .....	12
BAGIAN VI SARAN DAN KESIMPULAN .....	12
6.1 Saran .....	12
6.2 Kesimpulan.....	12
BAGIAN VII LAMPIRAN .....	13

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Regulasi .....	6
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana PPID Dinas PUPR Provinsi NTB .....	7
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia PPID Dinas PUPR Provinsi NTB .....	8
Tabel 3.1 Rekapitulasi Kunjungan Website dan Download DIP .....	10
Tabel 3.2 Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2022 .....	11
Tabel 7.1 Daftar Permohonan Informasi Tahun 2022 .....	13

## **BAGIAN I**

### **GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI**

Transisi demokrasi di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998, telah mengubah paradigma penyelenggaraan negara yang semula tertutup menjadi lebih terbuka serta memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik. Salah satu produk regulasi dari paradigma baru tersebut adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP secara tegas memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran. Dengan kata lain, publik memiliki hak atas informasi dari badan publik.

UU KIP merupakan produk regulasi yang cukup maju dalam mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan negara. Praktik penyelenggaraan negara secara terbuka juga kini tengah digiatkan secara global. Salah satu inisiatif internasional yang dibangun untuk mewujudkan keterbukaan informasi adalah Open Governance Partnership (OGP). Sebagai salah satu negara yang telah berkomitmen terhadap inisiatif OGP, Indonesia bertanggungjawab untuk menjalankan berbagai inisiatif untuk mendorong keterbukaan informasi di dalam negeri. Inisiatif tersebut dituangkan dalam rencana strategis Open Government Indonesia (OGI).

Seluruh kegiatan penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi rencana strategis Open Government Indonesia (OGI) berada di bawah koordinasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Salah satu rencana aksi yang telah disusun di tingkat OGI adalah mengoptimalkan implementasi UU KIP yaitu mendorong percepatan pembentukan operasional layanan informasi lingkup Pemda melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah (Pemda) dan perangkatnya.

## 1.1 Regulasi

**Tabel 1.1** Regulasi

No	Regulasi
1	Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
2	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3	Peraturan Komisi informasi No.1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik
4	Permendagri No. 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6	Peraturan Presiden No. 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
7	Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang 1184/ 8/ 2013 tahun 2013 tentang SOP PPID
8	Keputusan Menteri No. 356 tahun 2014 tentang Organisasi Pengelola PPID

## 1.2 Arah Prioritas Pelayanan

Tugas dan fungsi pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB pada tahun 2023 antara lain:

Tugas PPID mengelola, mempublikasikan/mengumumkan, melaksanakan pelayanan informasi publik serta dokumentasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Fungsi PPID: 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2. Pengolah, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 3. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Provinsi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi, 4. Melaksanakan kewenangan PPID Provinsi yang didelegasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat

**BAGIAN II**  
**GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI**

**2.1 Sekretariat Layanan**

Bertempat di jalan Majapahit nomor 8, gedung Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, PPID Dinas PUPR melaksanakan kegiatan harian berupa pelayanan informasi kepada masyarakat.

PPID Dinas PUPR memiliki 5 (lima) staf dan 1 (satu) koordinator untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat baik dalam bentuk offline maupun online. Permohonan dan pemberian informasi harus sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Selain pelayanan dengan cara langsung mendatangi instansi Dinas PUPR (offline), masyarakat juga diberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan permohonan informasi melalui sistem elektronik berupa website, facebook maupun instagram (online). Tidak berbeda dengan cara offline, cara online pun harus sesuai prosedur dan petugas PPID membantu mengarahkan masyarakat yang bersangkutan.

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat layanan, yang disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1** Sarana dan Prasarana PPID Dinas PUPR Provinsi NTB

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	Meja, 2 Kursi, PC, Internet, Buku, Lemari Arsip
2	Sarana Operasional Sekretariat PPID	2 PC, 1 AC, 2 Meja Kursi
3	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	Website, Twitter Facebook, Instagram (Dinas PUPR)

## 2.2 Sumber Daya Manusia

Secara struktural, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Atasan PPID, Ketua PPID, Koordinator dan Staf PPID.

**Tabel 2.2** Sumber Daya Manusia PPID Dinas PUPR Provinsi NTB

No	Kedudukan Dalam PPIDP Dinas PUPR Provinsi NTB	Jabatan / Nama	Tempat Tugas	Ket
1	<b>Atasan PPID</b>	Kepala Dinas		
2	<b>Ketua PPID</b>	Sekretaris Dinas		
3	<b>Bidang Pelayanan Informasi</b>			
	<b>Koordinator</b>	<b>Hj. Rohaniah HS, S.E., MM</b>	<b>Sekretariat Dinas</b>	
	Anggota :	1. Nyoman Dian Setiawati, ST	Sekretariat Dinas	
		2. Nur Izzati Rahmatun	Sekretariat Dinas	
4	<b>Bidang Pengelola Informasi</b>			
	<b>Koordinator</b>	<b>Muhsin Arianto, S.T</b>	<b>Bid. Tata Ruang</b>	
	Anggota :	1. Juraedah Dwi Anggraeni, ST, MT	Bid. SDA	
		2. Pajenk Diranksyah	Bid. BANGKIM	
		3. Agil Harnowo Putra, S.T	Bid. Tata Ruang	
		4. Firman Hermawan, S.T	Bid. BIKON	
		5. Pande Made Dewandaru, S.T	Bid. Bina Marga	
		6. Baiq Lusya Agustina, S.T	Bid. Cipta Karya	
5	<b>Bidang Pendokumentasian dan Arsip</b>			
	<b>Koordinator</b>	<b>Khaerus Sobri, ST</b>	<b>Bid. BANGKIM</b>	
	Anggota :	1. Kasi Perencanaan Teknis Jalan	Bid. Bina Marga	
		2. Kasi Perencanaan Teknis SDA	Bid. SDA	
		3. Kasi Perencanaan Tata Ruang	Bid. Tata Ruang	
		4. Kasi Tata Bangunan dan Permukiman	Bid. Cipta Karya	
		5. Kasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Bid. BIKON	
		6. Sahdi	Sekretariat Dinas	Humas
		7. Nudzransyah Alif Utama	Sekretariat Dinas	Humas
6	<b>Staf Sekretariat :</b>	1. M. Kausar Ramadhan, S.Kom	Sekretariat Dinas	
		2. Muhammad Mardani	Sekretariat Dinas	Humas
		3. Syadzali	Sekretariat Dinas	Humas
		4. Nawar Basyirah Achmad	Sekretariat Dinas	



### **2.3 Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Provinsi NTB**

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Website, FB, IG, TW) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan informasi terkait PUPR. Selain itu, dalam website Dinas PUPR juga telah disediakan Daftar Informasi Publik yang bersifat berkala ataupun serta merta yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh masyarakat. Adapun yang bersifat harian, pemohon informasi akan diarahkan mengisi form permohonan informasi dan data diri. Untuk Daftar Informasi Publik Dinas PUPR Provinsi NTB dapat diakses pada link ini: <http://dpu.ntbprov.go.id/web/page/Daftar-Informasi-Publik>

### **2.4 Besaran Anggaran**

Anggaran PPID Dinas PUPR Provinsi NTB tahun 2023 ini sejumlah Rp. 40.799.900,00, dari total pagu Dinas PUPR Provinsi sebesar Rp. 454.581.421.840,00.

**BAGIAN III**  
**LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Pelayanan informasi publik dari PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB menerapkan 2 cara, yaitu secara online maupun offline. Online dapat langsung mengirimkan permohonan informasi melalui website, facebook, instagram resmi Dinas PUPR Provinsi NTB. Sedangkan cara offline, masyarakat dapat langsung ke ruang PPID Dinas PUPR Provinsi NTB Unit Kerja Sekretariat.

**Tabel 3.1** Rekapitulasi Kunjungan Website dan Download DIP

No	Bulan	Jumlah Kunjungan (Kali)	Jumlah Download DIP (Kali)
1	Januari	991	330
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	3.093	386
6	Juni	13793	459
7	Juli	10565	240
8	Agustus	11611	374
9	September	11700	390
10	Oktober	14748	475
11	November	12917	430
12	Desember	12948	417
<b>Total</b>		<b>92366</b>	<b>3171</b>

Tabel 3.2 Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2023

PERMOHONAN INFORMASI 2023					
Bulan	Jumlah Pemohon	Waktu Penyelesaian	Jumlah yang Dikabulkan (Seluruh / Sebagian)	Alasan Penolakan	Ket
Jan	6	2	5	Diluar Kewenangan	
Feb	1	2	-		
Mar	1	3	1		
Apr					
Mei	4	2	1		
Jun	4	2	-		
Jul	1	1	1		
Agu					
Sep					
Okt	1	1	-		
Nov	2	1	-		
Des	3	1	-		

PERMOHONAN INFORMASI 2023									
Bulan	Jumlah Permohonan	Media		Guna		Waktu (hari)	Pemberian Informasi		
		Online	Offline	Individu	Lembaga		Penuh	Sebagian	Ditolak
Jan	6	1	5	1	5	1	5	1	0
Feb	1	1	0	1	0	1	0	1	0
Mar	1	0	1	0	1	3	1	0	0
Apr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	4	4	0	3	1	2	0	3	1
Jun	4	4	0	4	0	2	0	3	1
Jul	1	1	0	0	1	1	1	0	0
Agu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sep	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Okt	1	1	0	1	0	1	0	1	0
Nov	2	2	0	2	0	1	0	0	2
Des	3	3	0	3	0	1	0	0	3
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>7</b>

**BAGIAN IV  
PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI**

Sepanjang tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, alhamdulillah tidak pernah ada laporan keberatan ataupun sengketa informasi yang dilewati.

**BAGIAN V  
KENDALA**

Terdapat kendala yang dihadapi oleh PPID Dinas PUPR Provinsi NTB selama 1 tahun adalah:

- a. Masyarakat belum memahami prosedur dalam permohonan informasi

**BAGIAN VI  
SARAN DAN KESIMPULAN**

**6.1 Saran**

Melihat kendala yang dihadapi ditempat, beberapa saran yang dianjurkan sebagai berikut:

Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terkait mekanisme permohonan informasi yang disampaikan secara langsung kepada pemohon informasi. Dan Kami Dinas PUPR Provinsi NTB, mempermudah mekanisme permohonan data/informasi bagi masyarakat.

**6.2 Kesimpulan**

Dari uraian yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik sudah dijalankan dengan baik. Begitu pula dengan pelayanan informasi publik sudah dijalankan dengan baik, baik secara online maupun offline. Meskipun demikian, tetap diperlukan koordinasi yang cepat dan kuat antara PPID Dinas PUPR beserta Bidang / Balai lingkup Dinas PUPR guna mempertahankan dan meningkatkan pelayanan informasi bagi masyarakat.

Mataram,      Maret 2023

	<p>Disetujui oleh, Ketua PPID Dinas PUPR Provinsi NTB</p> <p><b><u>Ir. H. Hasim, MT.</u></b> <b>NIP. 19670322 199603 1 003</b></p>
--	--

**BAGIAN VII  
LAMPIRAN**

**Tabel 7.1** Daftar Permohonan Informasi Tahun 2023

No	Tanggal	Keperluan		Identitas Pemohon	Informasi yang Dimohonkan	Guna Informasi	Status		Alasan Penolakan	KET
		Perorangan	Lembaga / Instansi				Diterima	Ditolak		
1	12/12/2023	x		Tutik Alawiyah Syakirin	Data Shapefile (SHP) Kabupaten Lombok Tengah	Sebagai data primer dalam penelitian skripsi dengan judul "Analisis Penentuan Lokasi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok tengah"		x	Kewenangan PU Kabupaten	

2	12/7/2023	x	Annisatun Nadzafah	<p>Data Berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data, grafik atau tabel kejadian banjir di Kota Bima dari tahun 2010 sampai dengan 2022</li> <li>- Intensitas Hujan saat kejadian banjir di Kota Bima dari tahun 2010 sampai dengan 2022</li> <li>- Besar dampak dan kerusakan yang dialami akibat kejadian banjir di Kota Bima dari tahun 2010 sampai dengan 2022</li> <li>- Upaya penanggulangan dan perbaikan akibat banjir di Kota Bima dari tahun 2010 sampai dengan 2022</li> </ul>	<p>Tujuan permintaan data ini adalah untuk melengkapi data sekunder saya dalam penyusunan Tesis saya. Apabila ada pertanyaan atau lainnya terkait dengan data diri atau rincian detail permohonan data yang saya ajukan, bisa disampaikan melalui nomor whatsapp atau email yang sudah saya cantumkan.</p> <p>Besar harapan saya dapat di berikan data tersebut, karena saya sangat membutuhkan data valid dari instansi yang valid, untuk meningkatkan nilai akurasi data dalam tesis yang saya susun.</p>	x	Kewenangan BPBD Kota Bima	
---	-----------	---	--------------------	---	---	---	---------------------------	--

3	12/1/2023	x		Fayyad Zulfah Amru	Data CBR Dan LHR	Tugas Akhir/Skripsi		x	Kewenagnan PU Kabupaten	
4	11/30/2023	x		Mardhiyon Dwi Marthabayu	"zin untuk memohon data terkait penelitian skripsi sebagai berikut ini: 1. Kondisi terkini sumberdaya air di kota mataram 2. Data kebutuhan masyarakat terhadap sumberdaya air di kota mataram 3. Data program-program dan prasarana sumberdaya air yang sudah ada di kota mataram 4. Permasalahan khusus sumberdaya air kota mataram terbaru 5 tahun terakhir"	Untuk kebutuhan penelitian skripsi tentang penerapan konsep sponge city terhadap sumberdaya air di kota mataram tahun 2023		x	Kewenagnan PU Kabupaten	
5	11/24/2023	x		Fayyad Zulfah Amru	Data CBR, Peta Lokasi Dan Standarisasi Satuan Harga, Proyek Jalan Lingkar Utara Kabupaten Lombok Utara NTB	Skripsi		x	Kewenagnan PU Kabupaten	

6	10/5/2023	x		Nadia Desya Amanda	Permohonan Data rencana detail tata ruang desa Kekait ,Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat	Praktikum Mata kuliah Perencanaan Pembangunan Wilayah		x	Informasi yang diminta diluar kewenangan	
7	17/07/2023		x	Muhammad Sauqi Khatami	"Meminta data : - Rencana kerja tahunan Komisi Irigasi PUPR NTB - Rencana kerja 5 tahunan Komisi Irigasi PUPR NTB - Rencana Tata Tanam Dasar (RTTD) - Rencana Tata Tanam Global (RTTG)"	Sebagai referensi/acuan untuk menyusun rencana kerja tahunan dan 5 tahunan serta RTTD dan RTTG Komisi Irigasi PUPR Kalimantan Selatan		x		
8	17/6/2023	x		Vina Yunia Maulida	Data perhitungan parameter kualitas air Sungai Jangkok serta data tutupan lahan Sungai Jangkok Tahun 2008-2022	Saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir mengenai hubungan antara kualitas air Sungai Jangkok dengan tutupan lahan lahan di sekitarnya. Oleh karena itu saya memerlukan data kualitas air dan juga tutupan lahan tersebut untuk		x	Informasi yang diminta diluar kewenangan	



						mendukung penyelesaian tugas akhir saya. Terima kasih banyak			
9	08/06/2023	x		Muhammad Reyhan Abelardira	Data Batimetri Pantai dan Pasang Surut Air Laut Kota Mataram	Menyelesaikan Tugas Akhir saya di Universitas Pertamina yang berjudul "Pengurangan Dampak Abrasi Pesisir Pantai Mapak Indah Dengan Perencanaan Breakwater pada Pesisir Pantai"		x	Informasi yang diminta diluar kewenangan

10	6/6/2023	x		Siti Rostiana	"1. Data program yang telah dilaksanakan pada DAS Jangkok periode 2009-2015 2. Data perubahan kondisi tata ruang dan kualitas DAS Jangkok periode 2009-2015 3. Data kualitas air DAS Jangkok bagian hilir periode 2016-2022"	data penelitian skripsi		x	Informasi yang diminta diluar kewenangan
11	6/6/2023	x		Siti Rostiana	1. Data pengukuran kualitas air DAS Jangkok bagian hilir tahun 2016-2022	Data penelitian skripsi		x	dicancel ybs
12	5/30/2023		x	HENNY SAHARA	Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014	Sebagai rujukan dalam penyusunan ranpergub PSIH3 Provinsi Sumatera Utara	x		-
13	5/30/2023	x		Nurhidayatun	Peta kerusakan bangunan efek gempa yang terjadi tahun 2018.	Menunjang penelitian terkait efek gempa		x	Informasi yang diminta diluar kewenangan

14	5/19/2023	x		Nabila Nur Diana	ruas jalan Cakranegara (BTS. Mataram) - Mantang. Terkait dengan hal tersebut saya mohon informasi terkait dengan tahun pembuatan jalan dan umur rencananya, serta tahun pemeliharaan jalan terbaru dan umur rencananya.	Penelitian Skripsi		x	Informasi yang diminta diluar kewenangan	
15	05/17/2023	x		Muhammad Reyhan Abelardira	"dari Universitas Pertamina ingin mengajukan permohonan perihal data batimetri dan Pasang Surut air laut wilayah Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dalam upaya mengumpulkan data untuk menyelesaikan Tugas Akhir saya di Universitas Pertamina yang berjudul ""Pengurangan Dampak Abrasi Pesisir	pengerjaan tugas akhir		x	Data tidak dilengkapi	

					Pantai Mapak Indah Dengan Perencanaan Breakwater pada Pesisir Pantai"". oleh karena itu dimohon dengan sangat kepada bapak/ibu di tempat agar dapat membantu saya dalam pengerjaan tugas akhir tersebut."					
16	3/8/2023		x	Fak. Teknik Unizar	Permohonan data proyek 5 Tahun terakhir	Kampus	x			
17	01/02/2023	x		NI PUTU NEVI MARIANI	"1. Tata cara pembuatan ITR dan KKPR serta form ITR dan KKPR untuk Kabupaten Lombok Tengah 2. Peraturan terkait yang dapat membantu dalam pembuatan gambar perancangan bangunan seperti	Untuk pembuatan bangunan di Desa Selong Belanak, Kabupaten Lombok Tengah		x	Informasi yang diminta diluar kewenangan	

					KDB, KLB, KDH, GSB, JBB, bentuk arsitektural bangunan gedung"					
18	1/24/2023	x		Nurhidayatun	Tofografi sungai lombok barat dam bima	Skripsi		x	Informasi yang diminta diluar kewenangan	
19	1/24/2023		x	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh	Permohonan informasi keabsahan kontrak dan BAST	Intansi	x			
20	1/12/2023		x	Kanwil BPN Prov. NTB	Permohonan data pengadaan tanah Tahun 2016-2022	Intansi	x			
21	1/12/2023		x	Kanwil BPN Prov. NTB	Permohonan data lokasi indikatif pengadaan tanah	Intansi	x			
22	1/10/2023		x	Setda Prov. NTB	permohonan data dan informasi dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Prov. NTB Tahun 2022	Intansi	x			

23	1/5/2023		x	BPS Prov. NTB	Permintaan data untuk bahan rekonsiliasi data panjang jalan Prov. dan Kab/Kota se-Prov. NTB	Intansi	x			
----	----------	--	---	---------------	---	---------	---	--	--	--